

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI DESA KALUKUBULA

Shofiyah Lahtifah ^{1*}; M. Nur Alamsyah ²; Rusmawaty Bte Rusdin ³;

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; shofiyahlhatifah@gmail.com

²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; alamsyah_sip2000@yahoo.com

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; rusmawatyrusdin2025@gmail.com

*Correspondence : shofiyahlhatifah@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada 2024, Masyarakat, Desa Kalukubula, Sigi Biromaru*

Received : November 2025

Revised : Desember 2025

Accepted : Desember 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang dilatarbelakangi oleh rendahnya keterlibatan warga dalam proses politik. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan melibatkan 8 informan yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat bervariasi berdasarkan empat kategori partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson (1976), yaitu aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang tergolong sebagai aktivis dan partisipan, sementara mayoritas berada pada kategori pengamat dan apolitis. Penurunan partisipasi politik tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kendala administratif kependudukan, faktor pekerjaan, mobilitas penduduk, serta persoalan zonasi pendidikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat serta mengimplikasikan pentingnya penguatan literasi politik dan perbaikan tata kelola kependudukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada di masa mendatang.

ABSTRACT

This study aims to explain the factors influencing the decline in public political participation in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Kalukubula Village, Sigi Biromaru District, Sigi Regency, which is motivated by the low involvement of citizens in the political process. This study uses a qualitative descriptive design involving 8 informants selected purposively. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the level of public political participation varies based on four categories of political participation according to David F. Roth and Frank L. Wilson (1976), namely activists, participants, observers, and apolitical, where only a small portion of the community is classified as activists and participants, while the majority is in the observer and apolitical categories.

The decline in political participation is influenced by low political literacy, population administration constraints, employment factors, population mobility, and educational zoning issues. This research contributes to understanding the causes of low public political participation and implies the importance of strengthening political literacy and improving population governance to increase public participation in future regional elections.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokratis yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini menjadi dasar bagi berbagai reformasi dalam sistem pemerintahan, termasuk perubahan mekanisme pemilihan dari sistem perwakilan tidak langsung menjadi pemilihan langsung oleh rakyat (Mbu, Yohanes and Pekuwali, 2025). Dengan demikian, rakyat berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus berpijak pada kepentingan publik.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan prinsip tersebut melalui proses politik yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Mustajib, 2025). Demokratisasi di tingkat lokal diyakini dapat mempercepat pembangunan sosial-ekonomi yang lebih sesuai kebutuhan daerah, karena kebijakan publik yang dihasilkan lebih responsif terhadap karakteristik dan dinamika masyarakat setempat. Pemilihan langsung pun memperkuat legitimasi politik serta mendorong terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik (Satria and Chahnia, 2025).

Syamsudin Haris menegaskan bahwa pemilu merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat, karena prosesnya yang terbuka dan melibatkan partisipasi massal dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran politik warga (Rantau, 2019). Pemilihan Presiden 2024, misalnya, menunjukkan tingginya dinamika politik dan antusiasme masyarakat (Saputra and Mesra, 2024). Namun, dinamika tersebut juga menghadirkan tantangan, karena dalam berbagai jenis pemilihan sering muncul potensi konflik sosial yang memerlukan penanganan komprehensif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan peran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan keterbukaan informasi publik. Pasal 12 huruf j mewajibkan KPU melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu, sedangkan Pasal 14 huruf c mewajibkan KPU memberikan informasi menyeluruh mengenai setiap proses dan tahapan pemilu. Kewajiban tersebut menekankan pentingnya transparansi dan edukasi politik guna mewujudkan pemilu yang demokratis (Umar, Rahim and Moha, 2025).

Dalam konteks lokal, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Palu pada Pemilu

Presiden dan Legislatif 2019 mencapai 86,5 persen, melampaui target nasional. Namun pada Pilkada 2020 partisipasi menurun drastis menjadi 65,5 persen (Husain *et al.*, 2023). Penurunan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik sangat dipengaruhi konteks pemilihan, isu lokal, dan *engagement* masyarakat terhadap kandidat. Hal ini relevan dengan kondisi Desa Kalukubula, di mana partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 juga mengalami penurunan. Penelitian ini menelaah bagaimana masyarakat Desa Kalukubula terlibat dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari pemahaman terhadap calon, keterlibatan dalam kampanye, hingga kehadiran pada hari pemungutan suara.

Meskipun masyarakat dan pemerintah menunjukkan komitmen terhadap demokrasi, muncul fenomena meningkatnya daerah dengan satu pasangan calon dalam Pilkada, sehingga memunculkan pilihan “kotak kosong” menjelang Pilkada 2024 (Mulyadi *et al.*, 2024). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas demokrasi lokal. Demokrasi modern yang berbasis pada sistem perwakilan mensyaratkan kompetisi antar kandidat agar pemilih memiliki pilihan nyata (Arrsa, 2014). Tanpa kompetisi yang seimbang, pemilu berpotensi menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan (Zamhasari, 2024).

Penelitian ini berfokus pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Tingkat partisipasi tahun 2024 hanya mencapai 61%, jauh lebih rendah dibandingkan pemilihan sebelumnya. Penurunan ini diduga dipengaruhi beberapa faktor, seperti meningkatnya sikap apatis, kendala administratif kependudukan, persoalan zonasi pendidikan, serta mobilitas pekerjaan yang membuat sebagian pemilih tidak hadir di TPS. Kecenderungan masyarakat sebagai pengamat dan sikap apolitis juga memperlemah keterlibatan mereka dalam proses politik.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan pola serupa. (Meyliana and Erowati, 2020) pada Pilkada Tana Toraja 2015 dan 2020 menemukan bahwa rendahnya kesadaran politik dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah memengaruhi partisipasi pemilih. (Purnigsing, 2021) menegaskan bahwa partisipasi politik masyarakat masih bersifat pasif, sementara (Pratama, 2023) menemukan bahwa KPU masih menghadapi hambatan dalam pendidikan politik masyarakat. (Amal, 2024) menunjukkan bahwa partisipasi pada Pilkada 2020 di Kabupaten Tanah Datar dipengaruhi faktor pendidikan, status sosial ekonomi, dan pandemi. Temuan terbaru dari (Raden *et al.*, 2025) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Kalukubula didominasi kelompok pengamat dan apolitis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024 di Desa Kalukubula. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan politik, serta menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada pemilihan berikutnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan

data berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan delapan informan, terdiri dari Kepala Desa Kalukubula periode 2023–2028, Wakil Ketua BPD, panitia pemungutan suara, serta masyarakat setempat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang memungkinkan peneliti menyesuaikan arah pertanyaan sesuai situasi dan informasi yang berkembang di lapangan. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumen desa, laporan kegiatan, arsip pelaksanaan Pilkada, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan proses Pilkada. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan tahapan analisis kualitatif model Miles dan Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga hasil wawancara dapat dilengkapi, dibandingkan, dan divalidasi dengan dokumen yang relevan.

Hasil

1. Aktivis

Partisipasi politik masyarakat pada kategori aktivis merupakan kelompok dengan tingkat keterlibatan tertinggi, sebagaimana dijelaskan dalam teori partisipasi politik David Roth dan Frank Wilson (1976). Kelompok ini umumnya terdiri atas individu yang aktif dalam kegiatan kampanye, pengorganisasian politik, atau terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga memiliki pengaruh strategis dalam dinamika politik lokal.

Desa Kalukubula pada Pilkada 2024, keberadaan kelompok aktivis terlihat dari keterlibatan sebagian warga sebagai tim sukses, relawan, saksi, maupun anggota KPPS. Kepala Desa Kalukubula menyampaikan bahwa sebagian masyarakat memang aktif mengikuti kegiatan politik, terutama sebagai tim sukses dan relawan. Hal serupa ditegaskan oleh Wakil Ketua BPD yang menyatakan bahwa setiap desa termasuk Kalukubula selalu memiliki warga yang terlibat aktif dalam politik praktis, meskipun tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan tetap rendah.

Keterlibatan aktivis juga terlihat dari warga seperti Bapak Jamaludin L. Nusu yang menyatakan bahwa motivasinya menjadi tim sukses didasarkan pada keinginan mendukung calon dengan visi-misi yang dianggap baik. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi ideologis dan aspirasi politik menjadi pendorong utama kelompok aktivis. Namun, tidak semua warga memilih terlibat intens; sebagian seperti Ibu Zulpiana lebih memilih berpartisipasi sebagai pemilih biasa tanpa afiliasi politik demi menjaga independensi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Purnigsing, 2021) di Kota Palu yang menunjukkan bahwa aktivis politik umumnya memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi dan jaringan sosial yang kuat. Hasil ini juga didukung penelitian (Amal, 2024) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan dan status sosial berpengaruh terhadap partisipasi sebagai aktivis.

Secara keseluruhan, keberadaan aktivis di Desa Kalukubula memang nyata, namun jumlahnya terbatas. Meskipun peran mereka penting dalam mobilisasi politik, partisipasi masyarakat secara umum tetap rendah sehingga diperlukan peningkatan literasi politik agar kesadaran warga dalam berpartisipasi dapat meningkat.

2. Partisipan

Dalam piramida partisipasi politik David Roth dan Frank Wilson (1976), kelompok partisipan berada satu tingkat di bawah aktivis dan terlibat secara rutin dalam kegiatan politik, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Mereka berperan sebagai petugas kampanye, pengurus partai tingkat menengah, atau anggota kelompok sosial-politik yang membantu penyebaran informasi, menghadiri rapat, serta mendukung mobilisasi pemilih. Peran ini menjadikan partisipan sebagai penghubung antara elit politik dan masyarakat dalam memperkuat komunikasi politik di tingkat lokal.

Dalam Pilkada 2024 di Desa Kalukubula, peran partisipan tetap terlihat, namun tingkat keterlibatan masyarakat secara umum mengalami penurunan. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Kalukubula, partisipasi pemilih turun dari 77% pada Pilkada 2020 menjadi 61% pada tahun 2024, menunjukkan masih besarnya kelompok masyarakat yang bersikap apatis. Penurunan ini dipengaruhi oleh minimnya akses informasi, rendahnya minat politik, kurangnya kepercayaan terhadap proses pemilihan, serta masih adanya pemilih yang tidak terdaftar secara administratif.

Wakil Ketua BPD Kalukubula menegaskan bahwa peningkatan partisipasi hanya dapat dilakukan apabila pemerintah dari tingkat kabupaten hingga RT lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Pilkada sebagai penentu arah pembangunan daerah. Selain itu, anggota PPS Desa Kalukubula menjelaskan bahwa tingkat partisipasi hanya mencapai sekitar dua pertiga dari total pemilih, termasuk pemilih yang datang menggunakan KTP karena belum terdaftar dalam data kependudukan.

Meskipun demikian, beberapa warga menunjukkan motivasi rasional dalam menggunakan hak pilihnya, seperti keinginan memilih pemimpin yang memiliki visi-misi jelas dan memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Namun secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kelompok partisipan di Desa Kalukubula cenderung pasif, hanya hadir saat hari pemilihan tanpa keterlibatan lanjutan dalam kampanye atau kegiatan politik lainnya. Hasil ini sejalan dengan temuan (Pratama, 2023) dan (Meylana and Erowati, 2020), yang menyatakan bahwa partisipan pada umumnya didorong oleh kewajiban sosial dan hanya aktif pada tahap pemungutan suara.

3. Pengamat

Partisipasi politik pada tingkat pengamat merupakan kategori ketiga dalam piramida partisipasi politik menurut David Roth dan Frank Wilson (1976). Pada kategori ini, individu terlibat secara pasif dalam aktivitas politik; mereka mengikuti perkembangan isu politik melalui diskusi, media, atau percakapan sosial, tetapi tidak merasa perlu untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan. Tingkatan ini bersifat situasional, dipengaruhi oleh isu tertentu, lingkungan sosial, dan momentum politik. Kelompok pengamat memiliki peran strategis dalam pembentukan opini publik, meskipun tidak aktif sebagai pemilih atau bagian dari struktur politik.

Fenomena ini terlihat pada masyarakat Desa Kalukubula pada Pilkada 2024, di mana sebagian besar warga hanya mengikuti isu politik tanpa berpartisipasi dalam pemilihan. Minimnya sosialisasi politik dari pemerintah, kurangnya informasi yang memadai, serta rendahnya kepercayaan terhadap proses pemilihan menjadi faktor utama yang menempatkan masyarakat pada kategori pengamat. Kepala Desa Kalukubula menyebutkan bahwa sebagian warga hanya mengikuti berita kampanye dari lingkungan sosial tetapi tidak merasa berkewajiban menggunakan hak pilihnya, bahkan ada yang bersikap masa bodoh. Kondisi ini menunjukkan lemahnya literasi politik dan ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Sebagian warga yang tergolong pengamat pasif masih berupaya mencari informasi, seperti dijelaskan oleh Wakil Ketua BPD bahwa beberapa masyarakat datang langsung menanyakan proses pemilihan ke kantor desa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran minimal, meskipun belum cukup untuk mendorong mereka menjadi pemilih aktif. Pada sisi lain, terdapat pula pengamat aktif yang mengikuti perkembangan politik secara lebih mendalam untuk dijadikan dasar dalam menentukan pilihan, dan sebagian akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya.

Fenomena pengamat di Desa Kalukubula sejalan dengan penelitian (Purnigsing, 2021) di Palu Selatan dan (Amal, 2024) di Tanah Datar, yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan cenderung berada pada tingkat partisipasi pasif sebagai spectator. Mereka mengetahui isu politik namun tidak terlibat dalam aktivitas politik formal. Hal ini memperkuat temuan bahwa rendahnya pendidikan politik, keterbatasan akses informasi, serta sikap apatis berkontribusi terhadap dominannya karakter pengamat di masyarakat.

Secara keseluruhan, sebagian besar warga Kalukubula mengikuti perkembangan Pilkada 2024 hanya melalui media dan percakapan sosial tanpa keterlibatan langsung dalam pemilihan. Meskipun pasif, kelompok pengamat tetap memiliki potensi untuk mendorong perubahan opini publik, sehingga peningkatan sosialisasi politik, edukasi pemilih, serta penyediaan informasi yang mudah diakses menjadi langkah penting untuk mengarahkan mereka menuju keterlibatan politik yang lebih aktif.

4. Orang yang Apolitis

Kelompok apolitis merupakan tingkatan paling bawah dalam piramida partisipasi politik David Roth dan Frank Wilson (1976). Individu dalam kategori ini cenderung tidak peduli terhadap isu politik, tidak mengikuti kegiatan politik formal, dan tidak menggunakan hak pilih. Sikap apolitis biasanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan politik, minimnya keyakinan bahwa politik berdampak pada kehidupan mereka, prioritas terhadap pekerjaan atau keluarga, serta ketidakpercayaan terhadap calon maupun proses pemilihan.

Fenomena apolitis tampak jelas pada masyarakat Desa Kalukubula dalam Pilkada 2024. Banyak warga tidak datang ke TPS karena merasa suara mereka tidak

memberikan perubahan, kurang memahami pentingnya pemilihan, dan tidak percaya pada proses atau kandidat yang bertarung. Kepala Desa Kalukubula menyampaikan bahwa partisipasi pada Pilkada 2024 hanya sekitar 7.000 dari 11.000 pemilih terdaftar, dan sebagian besar ketidakhadiran ini disebabkan oleh sikap cuek serta kurangnya pemahaman politik. Selain itu, terdapat masalah administratif berupa ribuan penduduk perumahan yang belum terdaftar secara resmi sebagai warga Kalukubula karena hambatan zonasi sekolah dan belum memindahkan dokumen kependudukan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada hak pilih mereka.

Wakil Ketua BPD juga menegaskan bahwa kurangnya pengetahuan politik menjadi faktor utama rendahnya partisipasi politik desa, meskipun setiap dusun memiliki potensi suara yang besar. Faktor internal seperti rasa malas, kesibukan bekerja, serta anggapan keliru bahwa memilih memerlukan surat undangan resmi turut memperburuk tingkat partisipasi. Beberapa warga juga enggan ke TPS karena lokasi terdaftar berbeda dengan domisili, sedang bekerja, mengurus anak, atau merasa tidak ada calon yang meyakinkan. Kendala administratif seperti belum memindahkan KTP akibat pertimbangan zonasi pendidikan menambah hambatan bagi warga untuk terlibat dalam pemilihan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Meyliana and Erowati, 2020) di Tana Toraja yang menyatakan bahwa apatisme politik muncul akibat rendahnya kepercayaan terhadap calon dan lembaga pemilu, serta penelitian (Pratama, 2023) di Bangka Barat yang menegaskan bahwa lemahnya pendidikan politik dan minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu menurunkan minat masyarakat untuk memilih.

Dengan demikian, sikap apolitis masyarakat Kalukubula tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketidakpedulian dan kesibukan, tetapi juga oleh minimnya sosialisasi politik, kurangnya informasi, serta persoalan administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan partisipasi di masa mendatang, diperlukan upaya berkelanjutan berupa perbaikan pendaftaran warga, peningkatan edukasi politik, dan sosialisasi intensif mengenai prosedur pemilihan agar masyarakat memahami bahwa suara mereka memiliki dampak nyata pada pembangunan daerah.

Pembahasan

1. Aktivis

Keterlibatan aktivis pada Pilkada 2024 di Desa Kalukubula mencerminkan posisi mereka sebagai tingkat partisipasi tertinggi dalam piramida partisipasi politik Roth dan Wilson (1976). Aktivis menunjukkan intensitas dan konsistensi keterlibatan politik yang lebih kuat dibandingkan partisipan maupun pengamat. Meskipun jumlahnya tidak banyak, kelompok ini memainkan peran strategis dalam mobilisasi pemilih, penyebarluasan informasi politik, serta memastikan proses pemilihan berjalan efektif dan demokratis.

Wawancara dengan Kepala Desa Kalukubula mengungkap bahwa aktivitas tim sukses dan relawan kampanye tetap aktif berjalan, meskipun pemerintah desa secara tegas menjaga netralitas demi menjaga legitimasi pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika politik lebih digerakkan oleh inisiatif warga daripada struktur pemerintahan desa. Wakil Ketua BPD menambahkan bahwa dukungan terhadap figur

tertentu menjadi faktor utama munculnya aktivis, namun rendahnya antusiasme masyarakat secara umum membuat aktivis harus bekerja lebih keras dalam mendorong partisipasi pemilih.

Penyelenggara pemilu melalui anggota PPS menjelaskan bahwa sebagian warga terlibat sebagai KPPS, relawan, dan saksi. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa aktivis tidak hanya berfokus pada pemenangan kandidat, tetapi juga terlibat pada aspek teknis pemilu yang berfungsi menjaga transparansi dan integritas proses pemilihan. Wawancara dengan warga memperlihatkan bahwa motivasi menjadi aktivis pun beragam: ada yang tergerak oleh komitmen ideologis dan tanggung jawab politik seperti Jamaludin L. Nusu, sementara lainnya seperti Ibu Zulpiana memilih untuk tidak menjadi aktivis demi menjaga netralitas pribadi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Matthew J, Toon and Antony, 2016) yang menemukan bahwa aktivis umumnya berasal dari kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke atas. Pendidikan tinggi meningkatkan literasi politik, rasa percaya diri, serta kecakapan dalam memahami isu politik sehingga mendorong mereka terlibat lebih aktif. (Alfisahrin and Arafat, 2024) juga menegaskan bahwa Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menentukan kualitas kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilihan umum langsung yang jujur dan adil. Selain itu, penelitian (Fikriansyah, 2025) menunjukkan bahwa Kepercayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh jaringan sosial dan norma yang berkembang di lingkungan sosial.

Secara keseluruhan, aktivis memiliki posisi penting sebagai penggerak mobilisasi politik, penyampai informasi, dan penjaga teknis pemilu. Namun, jumlah aktivis yang terbatas serta rendahnya kesadaran politik masyarakat menyebabkan pengaruh mereka belum mampu meningkatkan tingkat partisipasi secara signifikan pada Pilkada 2024. Oleh karena itu, peran aktivis perlu diperkuat melalui dukungan pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, dan sosialisasi pemilu yang lebih sistematis agar mampu menciptakan partisipasi politik yang lebih luas dan berkelanjutan di Desa Kalukubula.

2. Partisipan

Partisipasi politik kelompok partisipan pada Pilkada 2024 di Desa Kalukubula menunjukkan keterlibatan warga pada tingkat dasar sebagaimana dijelaskan oleh Roth dan Wilson (1976). Pada tingkatan ini, masyarakat umumnya hanya terlibat dalam pemungutan suara tanpa mengikuti proses politik lainnya seperti sosialisasi, diskusi publik, atau kegiatan kampanye. Artinya, partisipasi berlangsung secara minimal dan belum mencerminkan kesadaran politik yang mendalam.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat menurun dari 77% pada tahun 2020 menjadi 61% pada tahun 2024. Kepala Desa dan Wakil Ketua BPD menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, minimnya informasi tentang calon, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya satu suara dalam menentukan arah pembangunan.

Data dari PPS juga memperkuat bahwa partisipasi di Kalukubula lebih bersifat kuantitatif, di mana warga hadir di TPS namun tidak aktif mengikuti tahapan politik sebelumnya.

Wawancara dengan warga seperti Jamaludin L. Nusu dan Zulpiana menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memilih karena rasa tanggung jawab dan harapan pada pemimpin yang berkompeten. Meski demikian, motivasi tersebut belum berkembang menjadi keterlibatan politik yang lebih aktif. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Risman, Muhiddin and Hartaman, 2023) yang menunjukkan bahwa indikator utama partisipasi politik masyarakat adalah keikutsertaan dalam pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi dalam bentuk lain seperti menghadiri rapat, menghubungi pejabat, atau terlibat dalam organisasi politik jauh lebih rendah.

Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal di Kalukubula masih belum ideal karena keterlibatan warga belum disertai pemahaman politik yang memadai. Agar partisipan dapat berkembang menjadi pelaku politik yang lebih aktif, diperlukan peningkatan pendidikan politik, sosialisasi berjenjang hingga tingkat RT, serta pendekatan persuasif yang mampu menumbuhkan kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pengamat

Partisipasi politik pada tingkat pengamat merupakan posisi ketiga dalam piramida partisipasi politik menurut David Roth dan Frank Wilson (1976), di mana masyarakat hanya terlibat secara pasif: mereka mengikuti informasi politik, menyimak kampanye, atau berdiskusi, namun tidak menggunakan hak pilih maupun menghadiri kegiatan politik. Fenomena ini tampak jelas pada Pilkada 2024 di Desa Kalukubula, di mana banyak warga mengetahui isu politik melalui percakapan atau media namun tetap enggan datang ke TPS, bahkan menunjukkan sikap masa bodoh sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa, Bapak Ahlan Adjlan.

Namun, kelompok pengamat tidak bersifat homogen. Wakil Ketua BPD, Bapak Slamet Tria, serta anggota PPS, Lidya Lestiani, menjelaskan bahwa sebagian warga menunjukkan ketertarikan politik yang lebih tinggi. Warga seperti Bapak Jamaludin L. Nusu dan Ibu Zulpiana bahkan aktif mencari informasi untuk menentukan pilihan, meskipun tidak semuanya berujung pada partisipasi aktif dalam pemilihan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara literasi politik dan tindakan politik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Purnigsing, 2021) dan (Amal, 2024) yang menegaskan bahwa tingkat pengamat merupakan bentuk partisipasi yang paling umum terjadi di berbagai daerah, terutama ketika masyarakat memiliki ketertarikan terhadap isu politik namun belum memiliki dorongan kuat untuk terlibat secara aktif. Keduanya menekankan bahwa kelompok pengamat sering kali memiliki pengetahuan politik yang cukup, tetapi terhambat oleh rendahnya kepercayaan politik dan rendahnya pengaruh struktur formal terhadap perilaku memilih.

Penelitian lain turut mendukung temuan ini menemukan bahwa masyarakat yang berada pada tingkat pengamatan cenderung memiliki literasi politik memadai, namun keengganan terlibat dalam pemungutan suara muncul dari pesimisme

terhadap hasil pemilu. (Risman, Muhiddin and Hartaman, 2023) menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik menyebabkan masyarakat desa tidak memahami pentingnya partisipasi, prosedur pemilu, atau manfaat keterlibatan politik. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan motivasi untuk berpartisipasi aktif. Sementara itu, (Markarian, 2023) menjelaskan bahwa kehadiran di TPS sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya politik lokal, tingkat kepercayaan pada institusi politik, dan kebiasaan sosial. Misalnya, tingkat kepercayaan pada parlemen dan rendahnya korupsi terbukti meningkatkan partisipasi, sementara ketidakpercayaan dan pengalaman negatif dengan institusi negara justru menurunkan kehadiran.

Dengan demikian, meskipun secara teori pengamat dapat berperan sebagai penyebar opini dan penyerap informasi politik, dalam konteks Desa Kalukubula peran tersebut belum mampu meningkatkan partisipasi pemilih secara nyata. Minimnya pendidikan politik, kurangnya sosialisasi penyelenggara pemilu, rendahnya kepercayaan terhadap proses Pilkada, serta budaya politik yang belum partisipatif menjadi faktor utama terbatasnya keterlibatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan edukasi politik yang berkelanjutan, sosialisasi yang lebih intensif, serta pendekatan persuasif dari pemerintah desa dan penyelenggara pemilu agar kelompok pengamat dapat bertransformasi menjadi partisipan aktif pada pemilihan berikutnya.

4. Orang yang Apolitis

Fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2024 di Desa Kalukubula dapat dipahami melalui konsep masyarakat apolitis, yaitu kelompok yang berada pada tingkat terbawah dalam piramida partisipasi politik Roth dan Wilson (1976). Kelompok ini dicirikan oleh ketidakpedulian terhadap isu politik, rendahnya pengetahuan politik, serta kecenderungan mengutamakan kepentingan pribadi. Sikap apolitis tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan administratif yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Rendahnya minat memilih tampak jelas dari partisipasi yang hanya mencapai sekitar 7.000 dari total 11.000 pemilih dalam DPT. Sebagian masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari, sesuai dengan konsep budaya politik parokial-subjek Almond dan Verba (1963), di mana politik dipandang sebagai sesuatu yang jauh dan tidak relevan.

Faktor administratif juga menjadi penyebab penting. Sekitar 7.000 penduduk belum terdaftar sebagai warga Desa Kalukubula meskipun tinggal di wilayah tersebut, terutama masyarakat perumahan. Sistem zonasi pendidikan membuat banyak warga enggan mengurus perpindahan domisili karena takut mengganggu akses sekolah anak. Kesibukan bekerja di luar daerah dan proses administrasi yang dianggap rumit semakin memperkuat hambatan struktural terhadap partisipasi.

Minimnya pengetahuan politik turut memperburuk keadaan. Masih banyak warga yang tidak memahami prosedur pemungutan suara, seperti anggapan bahwa tanpa surat undangan mereka tidak dapat memilih meskipun membawa KTP. Hal ini

menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat masih rendah dan membutuhkan edukasi berkelanjutan.

Faktor ekonomi juga memengaruhi sikap apolitis. Sebagian warga lebih memilih bekerja, berdagang, atau mengurus keluarga dibanding meluangkan waktu untuk datang ke TPS. Bagi mereka, manfaat politik tidak terlihat secara langsung, sehingga prioritas diberikan pada kebutuhan ekonomi harian. Kurangnya informasi mengenai calon kepala daerah semakin memperkuat keputusan sebagian warga untuk tidak memilih. Minimnya sosialisasi mengenai visi, misi, dan rekam jejak calon membuat masyarakat ragu dalam menentukan pilihan, dan akhirnya memilih bersikap pasif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Meyliana and Erowati, 2020) yang menyatakan bahwa apatisme politik muncul akibat rendahnya kepercayaan terhadap calon dan lembaga pemilu, serta (Pratama, 2023) yang menegaskan lemahnya sosialisasi sebagai penyebab menurunnya partisipasi. Ini menunjukkan bahwa kondisi di Kalukubula bukanlah fenomena tunggal, tetapi bagian dari pola lebih luas yang dipengaruhi oleh minimnya pendidikan politik dan terbatasnya akses informasi. Secara keseluruhan, rendahnya partisipasi politik di Desa Kalukubula merupakan hasil interaksi antara sikap apatis, kendala administratif, rendahnya literasi politik, kesibukan warga, dan lemahnya sosialisasi. Untuk meningkatkan partisipasi pada pemilihan berikutnya, perlu dilakukan simplifikasi administrasi kependudukan, penguatan edukasi politik masyarakat, serta penyediaan informasi pemilu yang mudah diakses dan relevan. Dengan upaya tersebut, kelompok apolitis diharapkan dapat bergerak menuju keterlibatan politik yang lebih aktif sehingga kualitas demokrasi lokal dapat meningkat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024 di Desa Kalukubula, yang hanya mencapai 61 persen, dipengaruhi oleh sikap apatis, hambatan administrasi kependudukan, isu zonasi pendidikan, serta mobilitas pekerjaan. Dominasi kelompok pengamat dan apolitis menunjukkan bahwa banyak warga belum memandang Pilkada sebagai sarana penting dalam menentukan kebijakan publik. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau teknis pemilu, tetapi juga oleh kualitas informasi, komunikasi politik, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan partisipasi sebagai dasar legitimasi politik di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu desa dan sangat bergantung pada keterbukaan informasi sehingga potensi bias tetap ada. Selain itu, faktor ekonomi dan patronase politik belum dianalisis lebih jauh. Pemerintah desa dan KPU perlu memperkuat pendidikan politik, meningkatkan transparansi informasi, serta menyederhanakan layanan administrasi kependudukan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah studi serta memasukkan variabel ekonomi, patronase politik, dan intensitas komunikasi kandidat untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perilaku pemilih.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si., dan Ibu Rusmawaty Bte Rusdin, S.Sos., M.A., atas bimbingan dan masukan berharga selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada Pemerintah Desa Kalukubula, termasuk Kepala Desa, BPD, serta PPS/KKPS, serta masyarakat yang telah memberikan izin dan informasi. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Alfisahrin and Arafat, Y. (2024) "STUDI PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 26(1), pp. 01–26. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.23960/sosiologi.v26i01.1137](https://doi.org/10.23960/sosiologi.v26i01.1137).
- Amal, M.I. (2024) *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020*. Politik Indonesia Terapan.
- Arrsa, R.C. (2014) "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, 11(3), pp. 515–537. Available at: <http://www.ppotoda.orgNaskahditerima:4/8/2014revisi:18/8/2014disetujui:29/8/2014>.
- Fikriansyah, Muh.F.B. (2025) *ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN*, Politik Indonesia Terapan. Sumedang.
- Husain, S. et al. (2023) "PARTISIPASI PEMILIH MELALUI DESA PEDULI PEMILU PADA PEMILIHAN 2024 DI KOTA PALU," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), pp. 34–46. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.148>.
- Markarian, G.A. (2023) "The Impact of Police Killings on Proximal Voter Turnout," *American Politics Research*, 51(3), pp. 414–430. Available at: <https://doi.org/10.1177/1532673X221139142>.
- Matthew J, E., Toon, K. and Antony, M.S.R. (2016) "The Education Effect: Higher Educational Qualifications are Robustly Associated with Beneficial Personal and Socio-political Outcomes," *Social Indicators Research*, 126(3), pp. 1261–1298. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0946-1>.
- Mbu, P.Y.H., Yohanes, S. and Pekuwali, U.L. (2025) "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Demokrasi Lokal," *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), pp. 365–378. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2208>.
- Meyliana, I.F. and Erowati, D. (2020) "MENAKAR PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TANA TORAJA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020," *Jurnal Academia Praja*, 3(2), pp.

- 168–181.
- Mulyadi, D. *et al.* (2024) "FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TAHUN 2024," *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), pp. 234–263. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>.
- Mustajib (2025) "Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak," *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), pp. 136–151. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041>.
- Pratama, M.F.A. (2023) *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020*. Politik Indonesia Terapan.
- Purnigsing, P. (2021) *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Palu Di Kecamatan Palu Selatan Tahun 2015*. Universitas Tadulako.
- Raden, S. *et al.* (2025) *Membangun Sigi di Antara Dua Bencana (Percikan Pemikiran dan Kerja Nyata Gagasan Satu Dekade Mohamad Irwan Lapatta)*. Bogor: Divya Media Pustaka.
- Rantau, M.I. (2019) "PENGUATAN SISTEM RESIDENSIAL DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM," *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, pp. 181–193.
- Risman, Muhiddin, A. and Hartaman, N. (2023) "Political Participation of Fishermen Community Voters Amidst COVID-19 in the Local Election," *JCLP: Journal of Contemporary Local Politics*, 2(1), pp. 34–41.
- Saputra, A.M. and Mesra, R. (2024) "Implikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Aktivitas Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS)*, 1(1), pp. 65–77. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.64924/hpvzbp65>.
- Satria, N. and Chahnia, J. (2025) "Politik Hukum dalam Menetukan Arah Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(1), pp. 22–30.
- Umar, S.R., Rahim, E.I. and Moha, M.R. (2025) "Efektivitas Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Gorontalo pada Pemilu 2024," *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), pp. 142–159. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1823>.
- Zamhasari (2024) "DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TERHADAP DEMOKRASI: TINJAUAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), pp. 873–880.